

# IMPLEMENTASI ORIENTASI TEKNIS PENDIDIKAN KESETARAAN TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR SKB DALAM MENGELOLA PENDIDIKAN KESETARAAN

Melati Indri Hapsari\*

## Abstract

*Tutors play an important role in executing Non-formal and Informal Education program at Learning Activities Center, Therefore, technical orientation activities are organized to improve the tutors' ability to manage equivalency education. This research was conducted to obtain complete data and information needed to present a clear and complete description of the implementation of technical orientation program in P2PNFI Regional II, Semarang. To meet its objective, this research employed mixed method. Quantitative was used to obtain the tutors' competence in managing equivalency education after they were given technical orientation. Qualitative method was used to describe the implementation of technical orientation in equivalency education. The result of the research indicates the technical orientation program has improved the competence of Learning Activities Center tutors.*

*Keywords: technical orientation, competence, equivalency education, training*

## Abstrak

*Pamong belajar memiliki posisi yang penting dalam program PNFI di SKB. Untuk itu, kegiatan orientasi teknis diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan pamong belajar dalam mengelola pendidikan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai implemmentasi orientasi teknis pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh P2PNFI Regional II Semarang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian gabungan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran kompetensi pamong belajar SKB dalam pengelolaan pendidikan kesetaraan sebelum dan setelah orientasi teknis pendidikan kesetaraan. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang implementasi orientasi teknis pendidikan kesetaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan orientasi teknis telah membawa peningkatan pada kompetensi pamong belajar SKB dalam pengelolaan pendidikan kesetaraan.*

*Kata kunci: orientasi teknis, kompetensi, pendidikan kesetaraan, pelatihan.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

SKB untuk memberikan layanan PNFI diperlukan dukungan tenaga fungsional yang disebut Pamong Belajar (PB). Pamong belajar adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan/ penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan nonformal dan informal (KepMenkowsabang, 1999).

Pamong belajar memiliki posisi yang penting

dalam pengembangan model program PNFI, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak program PNFI di SKB. Hal tersebut karena pamong belajar merupakan tenaga fungsional yang secara teknis melaksanakan kegiatan pengembangan model program PNFI, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak program PNFI di SKB.

Pamong belajar SKB sebagai pengelola pendidikan kesetaraan merupakan figur sentral bagi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di lingkungan tempat pengelolaannya. Pengelola pendidikan kesetaraan mempunyai tugas

\* Pamong belajar P2PNFI Regional II Semarang

merencanakan, melaksanakan program/kegiatan pendidikan kesetaraan, dan menyiapkan laporan pengelolaan. Pengelola pendidikan kesetaraan yang profesional harus menguasai pengetahuan tentang pengelolaan pendidikan kesetaraan, kebijakan pemerintah, serta pengembangan kecakapan hidup bagi peserta didik dengan menggali sumber daya dan potensi lokal daerahnya.

Berdasarkan data identifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kompetensi pengelola pendidikan kesetaraan tahun 2009 menunjukkan sebanyak 78 orang pamong belajar yang bertugas sebagai pengelola pendidikan kesetaraan kurang mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas pokok yang diembannya misalnya dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengelolaan pendidikan kesetaraan (P2PNFI Regional II Semarang, 2009). Menyikapi kondisi tersebut maka perlu ada solusi untuk meningkatkan kemampuan pamong belajar dalam mengelola pendidikan kesetaraan. Pengelolaan pendidikan kesetaraan dengan baik diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditetapkan di masing-masing tingkatan PNF kesetaraan (Paket A, B, C).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pamong belajar dalam mengelola pendidikan kesetaraan dapat melalui kegiatan orientasi teknis. Secara terminologi, orientasi teknis memang belum mempunyai makna yang spesifik sehingga terminologi yang akan dipakai sebagai acuan adalah terminologi pendidikan dan pelatihan. Terminologi yang paling mendekati orientasi teknis adalah terminologi pelatihan.

Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) Regional II Semarang pada tahun 2010 memandang perlu mengadakan kegiatan orientasi teknis bagi pamong belajar SKB yang bertugas sebagai

pengelola pendidikan kesetaraan. Orientasi teknis tersebut merupakan kegiatan untuk mengarahkan dan membina pamong belajar agar mampu dan terampil melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin sehingga kegiatan/program pendidikan kesetaraan di SKB berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga diketahui apakah program orientasi teknis pendidikan kesetaraan bagi pamong belajar SKB pengelola pendidikan kesetaraan benar-benar memiliki kontribusi terhadap peningkatan kompetensi pamong belajar SKB dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendidikan kesetaraan.

#### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui gambaran implementasi orientasi teknis pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh P2PNFI Regional II Semarang.
2. Mengetahui gambaran kompetensi pamong belajar SKB dalam pengelolaan pendidikan kesetaraan sebelum orientasi dan setelah orientasi teknis pendidikan kesetaraan.
3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi orientasi teknis Pendidikan Kesetaraan yang dilaksanakan oleh P2PNFI Regional II Semarang.

#### **Manfaat Penelitian**

1. Bahan masukan bagi P2PNFI Regional II Semarang untuk meningkatkan mutu pengelolaan program orientasi teknis khususnya pendidikan kesetaraan dan menyusun rekomendasi bagi pengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan orientasi teknis yang akan datang.
2. Bahan masukan bagi pamong belajar SKB yang bertugas sebagai pengelola pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan.

## **KAJIAN TEORETIS**

### **Tinjauan Implementasi**

Implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program. Hal yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program. Implementasi membutuhkan para pelaksana yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai,

komitmen yang tinggi untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu peraturan pemerintah yang berlaku (Keban, 2008: 77).

Pelaksanaan atau implementasi di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *planning-organizing-leading-controlling*. Langkah-langkah dalam implementasi manajemen adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan

melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan di dalam implementasi manajemen dapat disusun berurutan sebagai berikut (Dwijowijoto, 2003: 162-163).

Tabel 1. Matriks Tahapan dan Rincian Pekerjaan dalam Implementasi Manajemen

No	Tahap	Isu Penting
1.	Implementasi Strategi (Pra Implementasi)	Menyesuaikan struktur dengan strategi
		Melembagakan strategi
		Mengoperasikan strategi
		Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
2.	Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> )	Desain organisasi dan struktur organisasi
		Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan
		Integrasi dan koordinasi
		Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia ( <i>recruiting &amp; staffing</i> )
		Hak, wewenang dan kewajiban
		Pendelegasian (sentralisasi dan desentralisasi)
		Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia
		Budaya organisasi
3.	Penggerakan dan Kepemimpinan	Efektivitas kepemimpinan
		Motivasi
		Etika
		Mutu
		Kerja sama tim
		Komunikasi organisasi
4.	Pengendalian	Negosiasi
		Desain pengendalian
		Sistem informasi manajemen
		Pengendalian anggaran/keuangan
		Audit

Menurut Gow dan Mors dalam Turner & Hulme (1997), dalam implementasi manajemen terdapat berbagai hambatan antara lain: (1) hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu, (7) sistem informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor, (9) dukungan yang berkesinambungan (Turner dan Hulme, 1997: 66 – 67).

#### Tinjauan Orientasi Teknis

Terminologi yang digunakan untuk menjelaskan tentang tinjauan orientasi teknis menggunakan

terminologi tentang pendidikan dan pelatihan, karena terminologi tentang orientasi teknis sendiri belum ada. Terminologi pendidikan dan pelatihan yang dapat menggambarkan dengan tepat tentang apa orientasi teknis itu. Selanjutnya, dalam tinjauan ini akan menggunakan terminologi pendidikan dan pelatihan khususnya pelatihan yang disesuaikan dengan kegiatan orientasi teknis yang telah dilaksanakan di P2PNFI Regional II Semarang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1989), "Pelatihan adalah proses melatih; kegiatan atau pekerjaan". Hadari Nawawi (1997:215–216) mengemukakan bahwa "Pelatihan pada dasarnya berarti proses memberikan bantuan bagi para pegawai untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangannya dalam melaksanakan pekerjaan".

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa pelatihan adalah proses merekayasa perilaku pegawai sedemikian rupa dalam aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas kerjanya secara optimal sebagai akibat tuntutan dan perkembangan lingkungan. Pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus bagi seseorang atau kelompok orang. Perbedaan istilah pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Perbandingan antara Pendidikan dan Pelatihan

	Pendidikan	Pelatihan
Pengembangan kemampuan	Menyeluruh ( <i>Overall</i> )	Mengkhusus ( <i>Specific</i> )
Area kemampuan (penekanan)	Kognitif, afektif, psikomotor	Psikomotor
Jangka waktu pelaksanaan	Panjang ( <i>long term</i> )	Pendek ( <i>short term</i> )
Materi yang diberikan	Lebih umum	Lebih khusus
Metode pembelajaran	Konvensional	In-konvensional
Penghargaan akhir proses	Gelar ( <i>degree</i> )	Sertifikat ( <i>non degree</i> )

Veitzai (2004:12), mengetengahkan konsep pelatihan sebagai berikut.

- (1) Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
- (2) Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan

pekerjaan saat ini;

- (3) Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya;
- (4) Program pelatihan formal adalah usaha memberi kerja untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memperoleh pekerjaan atau bidang tugas yang sesuai dengan kemampuan, sikap dan pengetahuannya;
- (5) Pelatihan adalah salah satu bentuk edukasi dengan prinsip-prinsip pembelajaran.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku sasaran diklat yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Dilihat dari pendekatan sistem, maka proses diklat terdiri dari *inputs*, *procces*, *outputs* dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses, seperti lingkungan, SDM, sarana dan prasarana, kurikulum.

Pelatihan dirancang harus sesuai dengan kebutuhan, dan tujuan yang ada, tidak boleh melenceng karena jika melenceng maka hasilnya tidak akan sesuai harapan. Pelatihan dirancang dan dilakukan biasanya untuk meningkatkan kinerja seseorang yang sebelumnya dianggap belum optimal, atau bahkan mengadakan keterampilan baru yang sebelumnya belum dimiliki seseorang.

Menurut Haris Mujiman (2007:56), kegiatan pelatihan merupakan siklus kegiatan berkelanjutan yang terdiri atas (1) analisis kebutuhan pelatihan, (2) perencanaan program pelatihan, (3) penyusunan bahan pelatihan, (4) pelaksanaan pelatihan (5) penilaian pelatihan.

#### (1) Analisis kebutuhan pelatihan

Menentukan analisis kebutuhan pelatihan terkait dengan beberapa aspek seperti siapa yang dilatih, terkait dengan tujuan pelatihan, untuk kebutuhan siapa pelatihan itu dilakukan, siapa penyelenggara pelatihan, bahan pelatihan ditentukan oleh penyelenggara pelatihan.

#### (2) Perencanaan program pelatihan

Kegiatan merencanakan program pelatihan secara menyeluruh yang meliputi (a) menetapkan tujuan pelatihan, (b) menetapkan bahan ajar pelatihan, (c) menetapkan metode-metode yang akan digunakan, (d) menetapkan alat bantu pelatihan, (e) menetapkan cara evaluasi pelatihan, (f) menetapkan tempat dan waktu pelatihan, (g) menetapkan instruktur pelatihan, (h) menyusun rencana kegiatan dan jadwal pelatihan, (i) menghitung anggaran yang dibutuhkan. Rencana pelatihan harus di-*review* berulang kali dengan

melibatkan berbagai nara sumber, baik pada tataran substantif maupun teknis penyelenggaraan pelatihan.

#### (3) Penyusunan bahan pelatihan

Bahan yang perlu disiapkan di antaranya adalah kurikulum dan silabus, bahan ajar dan *hand out*, pustaka pendukung, media pembelajaran, alat bantu pembelajaran.

#### (4) Pelaksanaan pelatihan

Pelaksanaan pelatihan mengikuti rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi di dalam pelaksanaannya selalu ditemukan masalah yang memerlukan pemecahan. Pemecahan masalah sering mengakibatkan adanya keharusan mengubah beberapa hal dalam rencana tetapi perubahan dan penyesuaian yang dilakukan harus berorientasi pada upaya mempertahankan kualitas pelatihan, menjaga kelancaran proses pelatihan serta tidak merugikan kepentingan partisipan.

#### (5) Penilaian pelatihan

Penilaian atau evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan keberhasilan maupun efektivitas penyelenggaraan diklat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk mengetahui hambatan atau permasalahan yang ada selama penyelenggaraan pelatihan.

### **Pendidikan Kesetaraan**

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C (Penjelasan Pasal 26 Ayat (3) UU Sisdiknas No. 20/2003). Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (UU No 20/2003 Sisdiknas Pasal 26 Ayat (6)).

Program pendidikan kesetaraan diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, usia, waktu, lokasi dan faktor lainnya, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengertian mengenai pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi konten, konteks, metodologi dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut

lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatih kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha mandiri (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

Standar kompetensi lulusan diberi catatan khusus. Catatan khusus ini meliputi (a) pemilikan keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Paket A), (b) pemilikan keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja (Paket B), (c) pemilikan keterampilan berwirausaha (Paket C). Perbedaan ini disebabkan oleh kekhasan karakteristik peserta didik yang karena berbagai hal tidak mengikuti jalur formal karena memerlukan substansi praktikal yang relevan dengan kehidupan nyata (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih induktif, konstruktif serta belajar mandiri melalui penekanan pada pengenalan permasalahan lingkungan serta pencarian solusi dengan pendekatan antar-keilmuan yang tidak tersekat-sekat sehingga lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan itu, sistem pembelajaran (delivery system) dirancang sedemikian rupa agar memiliki kekuatan tersendiri, untuk mengembangkan kecakapan komprehensif dan kompetitif yang berguna dalam peningkatan kemampuan belajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih induktif dan konstruktif. Proses pembelajaran pendidikan kesetaraan lebih menitikberatkan pada pengenalan permasalahan lingkungan serta cara berpikir untuk memecahkannya melalui pendekatan antar-disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dipecahkan. Penilaian dalam pendidikan kesetaraan dilakukan dengan lebih mengutamakan uji kompetensi.

Sasaran peserta didik pendidikan kesetaraan adalah masyarakat yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti pendidikan formal misalnya mereka yang:

- a. Mempunyai kesulitan sosial ekonomi seperti petani, nelayan, anak jalanan dan sejenisnya.
- b. Berada di pondok pesantren yang belum menyelenggarakan pendidikan.
- c. Etnik minoritas, terisolasi karena alasan geografis.
- d. *Kelompok masyarakat yang membentuk komunitas belajar sendiri dengan flexi learning.*
- e. Kelompok masyarakat yang menentukan pendidikan kesetaraan atas pilihan sendiri (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

Lembaga yang dapat menjadi penyelenggara

kelompok belajar pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B dan Paket C adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, komunitas belajar, pondok pesantren, takmir masjid/musholla dan pusat majelis taklim, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan badan hukum dan badan usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial masyarakat, organisasi keagamaan, UPT Diklat Perikanan, UPT Diklat Pertanian, UPT Diklat Transmigrasi. Penyelenggara tersebut harus mempunyai struktur organisasi, yang sekurang-kurangnya terdiri dari.

- a. Ketua penyelenggara
- b. Tenaga pendidik: (a) tutor mata pelajaran, (b) narasumber teknis (untuk pelajaran berorientasi vokasional) atau (c) tutor kecakapan hidup.

Sistem penilaian pendidikan kesetaraan dilakukan dengan (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

- a. Penilaian mandiri dengan mengerjakan berbagai latihan yang terintegrasi dalam setiap modul.
- b. Penilaian formatif oleh tutor melalui pengamatan, diskusi, penugasan, ulangan, proyek dan portofolio dalam proses tutorial.
- c. Penilaian semester.
- d. Ujian nasional oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.

Ujian nasional untuk program Paket A, Paket B dan Paket C dimaksudkan untuk menyetarakan lulusan peserta didik dari pendidikan nonformal dengan pendidikan formal/sekolah. Peserta ujian nasional adalah peserta didik program Paket A, Paket B dan Paket C dengan persyaratan administratif sebagai berikut.

- a. Terdaftar sebagai peserta didik dan tercatat dalam buku induk pada satuan pendidikan nonformal penyelenggara program Paket A, Paket B atau Paket C.
- b. Memiliki STTB atau ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan STTB/Ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah.
- c. Duduk di kelas/tingkat terakhir (kelas VI untuk Paket A, kelas III untuk Paket B dan Paket C).
- d. Telah menyelesaikan seluruh materi pembelajaran dan memiliki laporan hasil penilaian/rapor.
- e. Telah berumur sekurang-kurangnya 12 tahun untuk Paket A, 15 tahun untuk Paket B dan 18 tahun untuk Paket C (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

Pengelola pendidikan kesetaraan adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan.

a. Merencanakan program pendidikan kesetaraan

Perencanaan program harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan, sasaran dan sumber belajar. Selanjutnya pengelola menganalisis faktor kekuatan dan kelemahan program sehingga dapat menentukan prioritas program yang akan dilaksanakannya baik untuk rencana jangka pendek, menengah maupun program jangka panjang terkait dengan pendidikan kesetaraan.

b. Melaksanakan rekrutmen peserta didik dan tenaga pendidik

Pengelola pendidikan kesetaraan harus menentukan terlebih dahulu kriteria dan persyaratan yang harus dimiliki oleh calon peserta didik maupun pendidik yang akan direkrut. Perekrutan pendidik atau tutor, pengelola bisa mendasarkan pada standar tutor pendidikan kesetaraan yang dibuat oleh BSNP.

c. Melaksanakan/menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan

Salah satu tugas pokok yang penting dari pengelola pendidikan kesetaraan adalah menjamin kelangsungan pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan kesetaraan. Pengelola diharuskan dapat menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran. Pengelola harus dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang ada untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran.

d. Menyelenggarakan evaluasi

Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi

penyelenggaraan dan pembelajaran. Evaluasi penyelenggaraan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan sekaligus untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program sehingga ke depan pengelola dapat meningkatkan pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakannya. Pengelola pendidikan kesetaraan juga harus mampu memfasilitasi dan bekerja sama dengan tutor untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran. Pengelola berkewajiban menyediakan sarana dan alat serta bahan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran.

e. Membuat laporan

Laporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola baik kepada masyarakat, pemerintah atau pihak lain yang menjadi atasan langsung pengelola. Pengelola melaporkan pelaksanaan kegiatan pendidikan kesetaraan secara rutin dan berkala setiap bulan, triwulan, semester maupun akhir tahun.

f. Menjalin kemitraan

Jalinan kemitraan atau kerjasama adalah penting, oleh karenanya pengelola pendidikan kesetaraan harus dapat menjalin kemitraan terutama dengan pihak yang memiliki perhatian dalam bidang yang sama. Kerjasama ini akan banyak membantu untuk peningkatan layanan program pendidikan kesetaraan dan saling melengkapi layanan informasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam jaringan tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian gabungan (*mixing method*) antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Usaha penggabungan kedua pendekatan ini disebut sebagai strategi penelitian ganda (*multiple research strategies*), atau lebih populer disebut sebagai pendekatan triangulasi (Alsa, 2004). Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan cara komplementer, di mana hasil penelitian yang diperoleh melalui masing-masing pendekatan dengan fokus yang berbeda dikombinasi untuk memperkaya gambaran menyeluruh (Boski & Chodyncka, 2002).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian memiliki makna memahami peristiwa dalam kaitannya dengan orang dalam situasi tertentu. (Moleong, 2002:33). Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang apa

yang ada di lapangan secara alamiah dan mendalam. Data penelitian yang berupa kata-kata, respon subjek, dokumen dan hasil pengamatan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan fenomena yang ada secara lebih mendalam. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui tentang gambaran implementasi orientasi teknis pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh P2PNFI Regional II Semarang dan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi orientasi teknis Pendidikan Kesetaraan yang dilaksanakan oleh P2PNFI Regional II Semarang.

Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya berwujud bilangan (skor atau nilai, peringkat atau frekuensi), yang

dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik (Crewell, 2002). Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh gambaran kompetensi pamong belajar SKB dalam pengelolaan pendidikan kesetaraan sebelum orientasi dan setelah orientasi teknis pendidikan kesetaraan.

Subjek/informan penelitian untuk mendapatkan informasi tentang implementasi orientasi teknis pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh P2PNFI Regional II Semarang adalah Kepala Bidang Fasilitasi Sumber Daya, Kepala Seksi Fasilitasi Sumber Daya Manusia, staf Seksi Fasilitasi Sumber Daya Manusia sebanyak dua orang dan pamong belajar kelompok penelitian dan pengembangan pendidikan kesetaraan P2PNFI Regional II Semarang sebanyak enam orang.

Subjek/informan penelitian untuk mendapatkan informasi tentang peningkatan kompetensi pamong belajar SKB dalam mengelola pendidikan kesetaraan, evaluasi fasilitator dan evaluasi penyelenggaraan orientasi teknis pendidikan kesetaraan adalah pamong belajar SKB peserta orientasi teknis pendidikan kesetaraan sebanyak 80 orang.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti dibantu dengan catatan lapangan atau lembar

observasi, panduan wawancara untuk mendapatkan data tentang implementasi orientasi teknis pendidikan kesetaraan; kuesioner evaluasi fasilitator untuk mengetahui kemampuan fasilitator dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan orientasi teknis dan kuesioner evaluasi penyelenggaraan orientasi teknis pendidikan kesetaraan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan orientasi teknis pendidikan kesetaraan menurut peserta orientasi teknis pendidikan kesetaraan. Sedangkan untuk mendapatkan data tentang kemampuan kompetensi pamong belajar SKB yang bertugas mengelola pendidikan kesetaraan menggunakan soal *pre-post test*.

Metode analisis data untuk data kualitatif menggunakan tahap-tahap umum yang biasa dilaksanakan sebagai berikut (Miles & Huberman, 1984). Data yang menggambarkan peningkatan kompetensi pamong belajar SKB dalam mengelola pendidikan kesetaraan berbentuk kuantitatif yang merupakan hasil dari tes tertulis (*pre-post test*) dianalisis menggunakan uji t. Uji-t berpasangan (*Paired-Samples t Test*) digunakan untuk membandingkan selisih dua purata (*mean*) dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data terdistribusi normal (Uyanto, 2006). Uji t dilakukan menggunakan fasilitas program SPSS 12 for windows.

## HASIL PENELITIAN

### Hasil Penelitian

#### a. Implementasi Orientasi Teknis Pendidikan Kesetaraan

##### 1) Analisis kebutuhan orientasi teknis

Menentukan analisis kebutuhan orientasi teknis terkait dengan beberapa aspek seperti siapa yang diberi orientasi teknis, terkait dengan tujuan orientasi teknis, untuk kebutuhan siapa orientasi teknis itu dilakukan, siapa penyelenggara orientasi teknis, bahan orientasi teknis ditentukan oleh penyelenggara orientasi teknis.

Kegiatan identifikasi dan analisis kebutuhan orientasi teknis merupakan kegiatan yang niscaya harus dilakukan sebelum melaksanakan orientasi teknis. Tujuan kegiatan identifikasi dan analisis kebutuhan adalah untuk menggali dan mendapatkan aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan orientasi teknis tersebut seperti sasaran/peserta orientasi teknis, tujuan, penyelenggara dan bahan orientasi teknis. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Fasilitasi Sumber Daya Manusia yang menyatakan.

*“Untuk mengetahui materi kebutuhan orientasi teknis (ortek) yang relevan dengan permasalahan penyelenggaraan Diktara.”*

Berdasarkan struktur anggaran yang dimiliki P2PNFI Regional II Semarang selaku penyelenggara kegiatan orientasi teknis pendidikan kesetaraan tidak ada alokasi anggaran untuk melakukan identifikasi kebutuhan ke lapangan atau bertemu langsung dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan. P2PNFI Regional II Semarang hanya melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan orientasi teknis berdasarkan kebijakan dilansir oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kondisi tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bidang Fasilitasi Sumber Daya sebagai berikut.

*“Analisis kebutuhan orientasi teknis dilakukan namun hanya analisis kebijakan bukan analisis kebutuhan riil di lapangan. Untuk kegiatan orientasi teknik memang tidak ada anggaran untuk melakukan identifikasi kebutuhan di lapangan jadi perencanaan orientasi teknis termasuk materi berdasarkan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional yang saat ini berkembang.”*

Pihak-pihak yang terlibat dalam identifikasi dan analisis kebutuhan orientasi teknis adalah Kepala Seksi Fasilitasi Sumber Daya Manusia dan pamong belajar

kelompok penelitian dan pengembangan pendidikan kesetaraan. Hasil dari identifikasi dan analisis kebijakan pendidikan kesetaraan Kementerian Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut.

- a) Sasaran atau peserta orientasi teknis adalah pengelola pendidikan kesetaraan. Pengelola Pendidikan Kesetaraan adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan.
- b) Tujuan pelaksanaan orientasi teknis adalah pengelola pendidikan kesetaraan setelah mengikuti kegiatan orientasi teknis diharapkan mampu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dengan baik.
- c) Bahan atau materi yang akan disampaikan di kegiatan orientasi teknis adalah kebijakan PNFI, kebijakan pendidikan kesetaraan, kurikulum tingkat satuan pendidikan kesetaraan, spektrum pendidikan kesetaraan, diversifikasi layanan pendidikan kesetaraan, *placement test* pendidikan kesetaraan, teknik-teknik rekrutmen peserta didik dan pendidik pendidikan kesetaraan, administrasi penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan kesetaraan, strategi kemitraan dan jaringan kerja pendidikan kesetaraan, evaluasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penyusunan laporan pendidikan kesetaraan, pemberian motivasi kepada pendidik dan peserta didik, serta pengembangan media pembelajaran.

## 2) Perencanaan orientasi teknis

Kegiatan merencanakan program orientasi teknis secara menyeluruh yang meliputi (a) menetapkan tujuan orientasi teknis, (b) menetapkan bahan ajar orientasi teknis, (c) menetapkan metode-metode yang akan digunakan, (d) menetapkan alat bantu orientasi teknis, (e) menetapkan cara evaluasi orientasi teknis, (f) menetapkan tempat dan waktu orientasi teknis, (g) menetapkan instruktur/fasilitator/narasumber orientasi teknis, (h) menyusun rencana kegiatan dan jadwal orientasi teknis, (i) menghitung anggaran yang dibutuhkan. Rencana orientasi teknis harus di-*review* berulang kali dengan melibatkan berbagai narasumber, baik pada tataran substantif maupun teknis penyelenggaraan orientasi teknis.

Kegiatan perencanaan orientasi teknis pendidikan kesetaraan yang dilakukan oleh P2PNFI Regional II Semarang dibagi menjadi dua yaitu perencanaan yang bersifat teknis dan administrasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu staf Seksi Fasilitasi Sumber Daya Manusia.

*“Ya kalau teknis kasih ama pamong belajar, kalau administrasi saya ya ikut merencanakan.”*

Perencanaan yang bersifat teknis dilakukan oleh Kepala Seksi Fasilitasi Sumber Daya manusia dan pamong belajar yang menangani pendidikan kesetaraan. Hal-hal teknis pelaksanaan yang masuk ke dalam kegiatan perencanaan antara lain membuat desain dan jadwal, menentukan peserta dan narasumber. Perencanaan yang bersifat administrasi dilakukan oleh Kepala Seksi Fasilitasi Sumber Daya Manusia beserta stafnya. Hal-hal yang direncanakan antara lain menetapkan tempat dan waktu kemudian dibuat surat undangannya, menghitung anggaran, mempersiapkan ATK yang dibutuhkan, dan mempersiapkan alat bantu orientasi teknis.

## 3) Penyusunan bahan orientasi teknis

Bahan yang perlu disiapkan di antaranya adalah kurikulum dan silabus, bahan ajar dan *hand out*, pustaka pendukung, media pembelajaran, dan alat bantu pembelajaran. Bahan orientasi teknis disusun oleh pamong belajar yang kompeten. Bahan yang disusun adalah desain dan kurikulum orientasi teknis, bahan ajar, beserta alat evaluasinya. Bahan-bahan orientasi teknis tersebut setelah selesai disusun dan didiskusikan dengan tim akademisi untuk mendapatkan masukan agar dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan orientasi teknis. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Fasilitasi Sumber Daya.

*“Bahan orientasi teknis yang biasanya dibuat dalam bentuk modul dan cetak dalam bentuk buku biasanya yang menyusun ya pamong belajar kemudian didiskusikan dengan konsultan/dosen pembimbing.”*

Hasil dari penyusunan bahan orientasi teknis adalah desain dan kurikulum, bahan ajar sebanyak lima buah, desain poster, dan model orientasi teknis.

## 4) Pelaksanaan orientasi teknis

Pelaksanaan orientasi mengikuti rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi di dalam pelaksanaannya selalu ditemukan masalah yang memerlukan pemecahan. Pemecahan masalah sering mengakibatkan adanya keharusan mengubah beberapa hal dalam rencana tetapi perubahan dan penyesuaian yang dilakukan harus berorientasi pada upaya mempertahankan kualitas pelatihan, menjaga kelancaran proses orientasi teknis, serta tidak merugikan kepentingan partisipan.

Pelaksanaan orientasi teknis pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh P2PNFI Regional II Semarang berpedoman pada desain orientasi teknis yang telah disusun. Pelaksanaan orientasi teknis pendidikan kesetaraan dijadwalkan selama lima hari

selama 42 jam dengan tiap jamnya selama masing-masing 45 menit.

Secara garis besar, berdasarkan hasil pengamatan atau observasi peneliti pelaksanaan orientasi teknis sebagai berikut.

- a. Hari pertama, pendaftaran peserta dilanjutkan dengan pembukaan yang dibuka oleh Kepala P2PNFI Regional II Semarang, dan dilanjutkan dengan *pretest*. Kegiatan pada malam hari diisi dengan materi kebijakan pendidikan kesetaraan selama dua jam yang disampaikan oleh Danu Ismadi.
- b. Hari kedua, penyampaian materi KTSP dan sistem pembelajaran pendidikan kesetaraan selama enam jam disampaikan oleh Sukistiyarno. Sore harinya disampaikan materi strategi kemitraan oleh Sanoto Hadi selama tiga jam dan malam harinya dilanjutkan penyampaian materi pengembangan kewirausahaan selama tiga jam oleh Sri Lestari.
- c. Hari ketiga, materi yang disampaikan adalah pembimbingan konseling selama tiga jam oleh Sri Wahyuni, dilanjutkan penyampaian materi pengelolaan keuangan dan pelaporan pendidikan kesetaraan selama tiga jam oleh Bibit Solekhah dan Sulaiman. Sore dan malam hari disampaikan materi teknologi informasi komunikasi dan pengembangan media pembelajaran selama enam jam oleh Rahmat Gunarja.
- d. Hari keempat, praktik lapangan di dua PKBM yaitu PKBM Citra Ilmu dan PKBM Qoriyah Thoyibah.
- e. Hari kelima, pleno hasil praktik lapangan selama 4 jam, dilanjutkan dengan penutupan.

Metode yang digunakan dalam pembelajaran di kegiatan orientasi teknis adalah metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Hal yang membuat pelaksanaan kegiatan orientasi tidak nyaman karena jumlah peserta yang sangat besar sebanyak 80 peserta. Jumlah peserta yang sangat menyebabkan metode yang digunakan tidak variatif karena kekhawatiran bahwa materi yang disampaikan tidak akan dipahami oleh peserta apabila menggunakan metode lainnya.

Kegiatan orientasi teknis yang dilaksanakan perlu mendapat pemantauan yang intensif tidak hanya berasal dari panitia saja tetapi juga berasal dari pihak lain yang independen. Kegiatan orientasi teknis pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh P2PNFI Regional belum dipantau secara intensif oleh pihak independen bahkan Kepala Seksi yang mempunyai kegiatan pun hanya memantau secara insidental tidak dapat melakukan secara intensif.

Kondisi tersebut didukung dengan hasil observasi peneliti ketika pelaksanaan orientasi teknis. Kepala

Bidang Fasilitas Sumber Daya hanya dua kali melihat kegiatan orientasi teknis, sedangkan Kepala Seksi Sumber Daya Manusia hanya memantau sebanyak tiga kali saja. Hasil observasi tersebut didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Fasilitas Sumber Daya.

*"Ya... kala intensif ada petugas khusus ya tidak ada... tapi pasti ada yang memantau secara intensif ya panitia teknis dari pamong belajar itu karena dia sebagai panitia....."*

#### 5) Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan keberhasilan maupun efektivitas penyelenggaraan orientasi teknis berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk mengetahui hambatan atau permasalahan yang ada selama penyelenggaraan orientasi teknis.

Evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia orientasi teknis terdiri dari evaluasi peserta, fasilitator, dan penyelenggaraan. Hal tersebut didukung oleh salah satu panitia yang berasal dari pamong belajar, kelompok penelitian, dan pengembangan Pendidikan Kesetaraan.

*"Pelaksanaan orientasi teknis dilakukan evaluasi, baik penyelenggaraannya, fasilitatornya maupun pesertanya (dengan pretest dan posttest)."*

#### a. Evaluasi Peserta

Evaluasi Peserta yang meliputi *pretest* dan *post test*, evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi pelatihan. Berdasarkan perbandingan hasil *pretest* dan *posttest* diketahui bahwa kecenderungan peningkatan pengetahuan peserta pelatihan berdasarkan *mean/rata-rata* sebesar 18,73. Hasil evaluasi peserta terlampir.

#### b. Evaluasi Fasilitator

Evaluasi Fasilitator dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan peserta pelatihan terhadap penampilan fasilitator. Aspek yang dinilai antara lain penguasaan materi, penguasaan metode, penggunaan media, dan pemanfaatan waktu. Berdasarkan rekap hasil evaluasi fasilitator diketahui bahwa rerata penilaian peserta terhadap fasilitator, sebagai berikut.

- 1) Danu Ismadi, materi Kebijakan Diksetara, penilaian peserta 87,27.
- 2) Prof. Sukestiyarno, P.hD, materi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sistem Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan, penilaian peserta 84,27.
- 3) Dra. Sri Wahyuni, M.Pd, materi Pembimbingan Konseling, penilaian peserta 80,13.
- 4) Sanoto Hadi, S.Pd, materi Strategi Kemitraan, penilaian peserta 84,27.
- 5) Dra. Bibit Sholekhah, M. Pd dan Sulaiman, SE, materi Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Pendidikan Kesetaraan, penilaian peserta 80,16.

- 6) Rakhmad Gunarja, S.Pd., materi TIK, penilaian peserta 83,39
- 7) Dra. Sri Lestari, materi pengembangan kewirausahaan, penilaian peserta 74,64.

c. Evaluasi Penyelenggaraan

Evaluasi penyelenggaraan, dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan peserta terhadap penyelenggaraan orientasi teknis terutama pada pelayanan panitia yang meliputi penyediaan akomodasi konsumsi, kesekretariatan, dan lain-lain. Hasil penilaian peserta sebagai berikut.

- 1) Waktu penyelenggaraan: peserta merasakan waktu orientasi teknis sudah cukup. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi yang menunjukkan angka 61% menyatakan cukup dan 15% menyatakan sedang.
- 2) Kurikulum: penilaian peserta terhadap kurikulum orientasi teknis adalah 53% menyatakan bahwa penentuan jumlah mata pelajaran sudah baik dan 31% menyatakan cukup, 50% menyatakan bahwa manfaat praktis materi orientasi teknis sudah baik dan 31% menyatakan cukup, alur kegiatan keseluruhan 45% menyatakan baik dan 36% menyatakan cukup.
- 3) Pelayanan sekretariat: hasil evaluasi menunjukkan bahwa penilaian peserta terhadap sikap/pelayanan petugas sekretariat dinyatakan sudah baik, hal ini terlihat dari tabel evaluasi yang menunjukkan angka 65%.
- 4) Konsumsi: peserta orientasi teknis pengembangan SDM pendidikan kesetaraan ini merasa bahwa pengaturan waktu makan dan kudapan sudah cukup baik, hal ini terlihat pada tabel yang menunjukkan angka 64% dan sebanyak 15% menyatakan cukup, sedangkan tingkat menu, sebanyak 44% menyatakan sudah cukup dan 21% memberikan penilaian sedang.
- 5) Tempat belajar: hasil evaluasi menunjukkan 60% menyatakan baik bagi luas ruangan, sedangkan 64% menyatakan baik terhadap fasilitas meja, kursi, dan susunannya.
- 6) Asrama: peserta pelatihan merasakan bahwa asrama tempat menginap (fasilitas tempat tidur dan peralatannya) selama pelatihan ini dirasakan baik, hal ini terlihat pada tabel sebesar 59% menyatakan baik dan 23% menyatakan sudah cukup.
- 7) Praktik/kunjungan lapangan: sebanyak 61% menilai bahwa pelaksanaan praktik/kunjungan lapangan oleh peserta sudah cukup, sedangkan pemilihan objek atau tempat praktik lapangan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian peserta sebanyak 78% menilai baik.

Hasil dari evaluasi penyelenggaraan sudah

cukup baik tetapi masih ada saran/masukan dalam perbaikan kegiatan orientasi teknis mendatang yang berasal dari peserta antara lain.

- a. Waktu penyelenggaraan: Sebaiknya penyampaian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga materi yang disampaikan tidak berubah, sebaiknya waktu orientasi tidak terlalu lama, waktu untuk praktik lapangan dan diskusi ditambah.
- b. Kurikulum: Pembahasan materi agar lebih diintensifkan
- c. Pelayanan sekretariat: Mohon album kenangan peserta, tingkatkan pelayanan kesehatan atau obat-obatan
- d. Konsumsi: Sebaiknya menu yang disajikan tidak mengalami perubahan yang mencolok, terutama pada awal dan menjelang akhir kegiatan, bumbu ditambah supaya lebih enak.
- e. Asrama: Fasilitas belajar di kamar kurang, karena tidak seimbang dengan penghuninya, mohon disediakan tempat menjemur pakaian, diberi kunci ganda agar setiap penghuni bisa masuk, kamar mandi kotor, dan tempat belajar di kamar hendaknya diberi kursi.

6) *Output*

Hasil yang diharapkan adalah pengelola pendidikan kesetaraan meningkat kemampuannya dalam mengelola pendidikan kesetaraan. Pengelola pendidikan kesetaraan yang dalam kegiatan orientasi teknis pendidikan kesetaraan ini adalah pamong belajar yang mengelola program pendidikan kesetaraan di SKB masing-masing.

Hasil tersebut dapat dilihat melalui hasil evaluasi peserta menggunakan *pretest* dan *post test* untuk kemampuan pengetahuannya, sedangkan untuk kemampuan keterampilan yang diterapkan di lapangan harus melalui evaluasi dampak pelatihan. Evaluasi dampak pelatihan biasanya dilakukan setelah orientasi teknis selesai dan peserta pulang ke masing-masing daerah asalnya. Kegiatan evaluasi dampak dilakukan antara tiga sampai enam bulan setelah pelaksanaan orientasi teknis.

Kegiatan evaluasi dampak orientasi teknis untuk pendidikan kesetaraan ini tidak dilakukan karena struktur anggaran yang ada di P2PNFI Regional II Semarang tidak dianggarkan. Hal tersebut menghambat pengambilan kesimpulan apakah pelaksanaan orientasi teknis telah berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

- b. Kompetensi Pamong Belajar SKB sebagai Pengelola Pendidikan Kesetaraan Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Orientasi Teknis  
Peningkatan kompetensi pamong belajar

dalam mengelola pendidikan kesetaraan setelah mengikuti kegiatan orientasi teknis dapat dilihat dari peningkatan rata-rata skor *pretest* dan *post test*.

Tabel 3. Peningkatan Rata-Rata Kompetensi Pamong Belajar

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Nilai Pre Test	55,15	80	7,086	,792
	Nilai Post Test	73,88	80	7,600	,850

Hasil tabel 4.1 diketahui bahwa selisih nilai *pretest* dan nilai *post test* adalah  $55,15 - 73,88 = -18,73$ . Hasil tersebut berarti terdapat peningkatan sebesar 18,73 dari sebelum mengikuti orientasi teknis dan setelah mengikuti orientasi teknis.

Tabel 4. Uji t Nilai Pre Test – Nilai Post Test

Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
			Lower	Upper			
-18,725	9,825	1,098	-20,911	-16,539	-17,046	79	,000

Untuk mengetahui apakah peningkatan hasil evaluasi peserta bermakna atau signifikan dilakukan dengan melakukan uji beda dengan uji t. Hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai t sebesar -17,046 dengan derajat kebebasan =  $n-1 = 80-1 = 79$ . *Output* SPSS memberikan nilai *p-value* untuk uji dua sisi (2-tailed) = 0,000 karena nilai *p-value* lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  sehingga merupakan bukti kuat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara *pretest* dengan *posttest*.

Peningkatan kompetensi pamong belajar pengelola pendidikan kesetaraan sebelum dan setelah mengikuti orientasi teknis signifikan. Hasil tersebut diharapkan terjadi peningkatan keterampilan mengelola program pendidikan kesetaraan di lapangan. Peningkatan kualitas pengelolaan program pendidikan kesetaraan dapat diketahui apabila kegiatan orientasi teknis tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan evaluasi dampak orientasi teknis.

#### a. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung pelaksanaan orientasi teknis ini adalah semua sumber daya manusia yang melaksanakan orientasi teknis mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan penilaian mempunyai komitmen dan kompetensi yang baik. Hal tersebut

mendukung kualitas semua tahapan penyelenggaraan orientasi teknis pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan.

Faktor penghambat pelaksanaan orientasi teknis adalah adanya batasan anggaran sehingga tidak semua tahapan pelaksanaan orientasi teknis dapat dilakukan secara sempurna misalnya pada pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan evaluasi dampak yang belum bisa dilakukan.

#### Pembahasan

Menurut Setiyanto (2010), ada empat aspek kritis dalam program pelatihan. Aspek kritis pertama adalah komitmen organisasi terhadap pelatihan. Pelatihan akan berhasil jika organisasi memberikan komitmen serius terhadap program pelatihan. Kegiatan orientasi teknis yang dilaksanakan oleh P2PNFI Regional II Semarang merupakan komitmen lembaga dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia PNFI untuk meningkatkan pelaksanaan program-program PNFI di lapangan khususnya program pendidikan kesetaraan. Oleh karena kegiatan orientasi pendidikan kesetaraan ini merupakan komitmen lembaga maka pelaksanaan kegiatan orientasi ini dilakukan secara serius sesuai dengan desain kegiatan yang telah dibuat.

Aspek kedua adalah tahapan dalam program pelatihan. Tahapan pelatihan dimulai dengan analisis kebutuhan pelatihan, implementasi program pelatihan, dan evaluasi program pelatihan. Dalam orientasi teknis pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh P2PNFI Regional II Semarang ini tidak semua tahapan dilakukan. Untuk analisis kebutuhan pelatihan tidak berdasarkan kebutuhan lapangan tetapi berdasarkan identifikasi kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk evaluasi program pelatihan masih kurang satu tahapan evaluasi yaitu evaluasi dampak orientasi teknis. Kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui keluaran orientasi teknis.

Aspek ketiga adalah berbagai aspek kritis pelatihan. Ada enam unsur kritis dalam pelatihan, yaitu *needs assessment*, pelaksanaan, *course content*, *training delivery methods*, *impact*, dan *job aids*. Aspek keempat adalah solusi strategis masalah pelatihan.

Penyelenggaraan orientasi teknis perlu memperhatikan kualitas tiga unsur utama yakni masukan, proses, dan keluaran orientasi teknis.

#### a. Masukan orientasi teknis

Masukan orientasi teknis adalah peserta orientasi teknis yang karena jabatannya (struktural, fungsional, dan fungsional umum) dipersyaratkan mengikuti orientasi teknis untuk memenuhi standar kompetensi jabatannya. Peserta orientasi teknis

memainkan peranan yang menentukan dalam peningkatan mutu pelaksanaan orientasi teknis. Masukan dalam kegiatan orientasi teknis pendidikan kesetaraan adalah pamong belajar SKB yang bertugas untuk mengelola program pendidikan kesetaraan. Peserta tersebut telah mempunyai pengalaman di lapangan atau di lokasi kerjanya masing-masing dalam mengelola program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C sehingga hal tersebut mempermudah kegiatan diskusi ketika mengikuti kegiatan orientasi teknis.

#### b. Proses orientasi teknis

Unsur-unsur yang memroses masukan orientasi teknis meliputi empat bagian besar yaitu kelembagaan orientasi teknis, program orientasi teknis, sumber daya manusia penyelenggara orientasi teknis, dan fasilitator/narasumber. Untuk kelembagaan kegiatan orientasi teknis ini sudah jelas pelaksanaannya adalah P2PNFI Regional II Semarang. Program orientasi teknis pendidikan kesetaraan ini telah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan berdasarkan arah kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Program orientasi teknis pendidikan kesetaraan ini dituangkan dalam desain orientasi teknis. Sedangkan untuk sumber daya penyelenggara orientasi teknis terdiri dari panitia yang berasal dari pamong belajar kelompok penelitian dan pengembangan pendidikan kesetaraan dan dibantu oleh staf seksi fasilitasi sumber daya manusia. Fasilitator/narasumber untuk orientasi teknis pendidikan kesetaraan ini berasal dari berbagai unsur yang mempunyai kompetensi sesuai dengan materi yang diberikan dalam kegiatan orientasi teknis pendidikan kesetaraan. Fasilitator berasal dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Universitas Negeri Semarang dan Pamong Belajar P2PNFI Regional II Semarang.

#### c. Keluaran orientasi teknis

Keluaran orientasi teknis diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan penyelenggaraan orientasi teknis. Setelah selesainya penyelenggaraan suatu orientasi teknis, proses orientasi teknis sebenarnya belum berakhir. Lembaga orientasi teknis masih harus memantau kinerja lulusannya dalam bentuk evaluasi pasca orientasi teknis yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kompetensi yang telah dimiliki oleh peserta, dapat dimanfaatkan dalam tempat kerjanya. Jika terbukti bahwa yang bersangkutan sudah kompeten melakukan tugas-tugasnya, maka barulah orientasi teknis dapat dikatakan berhasil. Tetapi jika ternyata tugas-tugas belum dapat dilaksanakan dengan baik yang disebabkan karena kurang kompetensinya, maka pamong belajar yang bersangkutan perlu diorientasi teknis lagi. Tetapi kegiatan pasca orientasi teknis dalam rangka evaluasi dampak belum dilaksanakan oleh P2PNFI Regional II Semarang selaku lembaga penyelenggara kegiatan orientasi teknis. Kegiatan evaluasi dampak orientasi teknis tidak dilakukan oleh P2PNFI Regional II Semarang karena adanya keterbatasan struktur anggaran.

Berdasarkan uji statistik diketahui bahwa ada peningkatan kompetensi pamong belajar SKB dalam mengelola program pendidikan kesetaraan sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan orientasi teknis tersebut. Peningkatan kompetensi yang diperoleh tidaklah otomatis berarti terjadi peningkatan kinerja, karena selain kompetensi tidak identik dengan kinerja, juga unsur manajemen lainnya memang belum tersentuh. Sementara itu, untuk mengubah kompetensi menjadi kinerja diperlukan media lain seperti budaya kerja, alat kerja, motivasi, bakat, dan kesejahteraan.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan pembahasannya tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, *pertama*, implementasi orientasi teknis pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh P2PNFI Regional II Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang lengkap mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyusunan bahan orientasi teknis, pelaksanaan, dan penilaian. Namun, masih ada beberapa kekurangan dalam tahapan yang dilakukan antara lain a) untuk identifikasi sebaiknya tidak hanya mengidentifikasi kebijakan yang ada tetapi juga melakukan identifikasi

kebutuhan di lapangan agar hasil analisis kebutuhan merupakan aspirasi dari bawah bukan pemberian program orientasi teknis dari atas dan b) pemantauan pelaksanaan orientasi teknis agar lebih intensif dengan melibatkan pemantau independen.

*Kedua*, kompetensi pamong belajar SKB dalam pengelolaan pendidikan kesetaraan sebelum dan setelah orientasi teknis terjadi peningkatan sebesar 18,73. Hal tersebut juga diyakinkan dengan hasil uji t yang menghasilkan nilai t sebesar -17,046 dengan *p-value* sebesar 0,000 ini berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan kemampuan pamong belajar SKB

sebelum dan setelah mengikuti orientasi teknis.

*Ketiga*, faktor pendukung pelaksanaan orientasi teknis ini adalah semua sumber daya manusia yang melaksanakan orientasi teknis mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan penilaian mempunyai komitmen dan kompetensi yang baik. Faktor penghambat pelaksanaan orientasi teknis adalah adanya batasan anggaran sehingga tidak semua tahapan pelaksanaan orientasi teknis dapat dilakukan secara sempurna misalnya pada pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan evaluasi dampak yang belum bisa dilakukan.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat

disarankan, sebagai berikut (a) perlu adanya pelaksanaan identifikasi kebutuhan lapangan agar pelaksanaan orientasi teknis sesuai kebutuhan di lapangan, (b) pemantauan pelaksanaan orientasi teknis agar lebih intensif dengan melibatkan pihak independen, dan (c) perlu dilakukan evaluasi dampak orientasi teknis untuk mengetahui apakah terjadi juga peningkatan keterampilan peserta orientasi teknis pendidikan kesetaraan dalam mengelola program pendidikan kesetaraan dan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan yang dikelola oleh alumni peserta orientasi pendidikan kesetaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alsa, A. (2004). *Pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta kombinasinya dalam penelitian psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Boski, P., Van de Vijver, F.J.R., & Chodyncka, A.M. (2002). *New directions in cross-cultural psychology*. Waraszawa: Published by Polish Psychological Association
- Creswell, J.W. (2002). *Mixing methods: Qualitative and quantitative research*. Aldershot: Published by Avebury
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Pendidikan kesetaraan mencerahkan anak bangsa*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Dwijowijoto, R.N. (2003). *Kebijakan publik-formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Keban, T.Y. (2008). *Enam dimensi strategis administrasi publik, konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (1984). *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hill: Sage Publication Inc.
- Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara RI. (1999). *Keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara nomor 25/KEP/MK.WASPAN/6/1999 tentang jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya*. Jakarta: Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara RI
- Moleong, L.J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujiman, H. (2007). *Manajemen pelatihan: Berbasis belajar mandiri*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, H. (1997). *Manajemen sumber daya manusia untuk bisnis yang kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1989). *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Balai Pustaka
- P2PNFI Regional II Semarang. (2009). *Laporan need assesment pendidikan kesetaraan*. Semarang: P2PNFI Regional II Semarang.
- Viethzal, R. (2004). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan dari teori ke praktk*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiyanto, A. (2010). *Prinsip - Prinsip dasar manajemen pelatihan*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2010 dari <http://mm.uns.ac.id/jurnal.php>
- Turner, M. & Hulme, D. (1997). *Governance, administration, and development*. London: MacMillan Press
- Uyanto, S. (2006). *Pedoman analisis data dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu